

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis global pasca Westphalia telah menciptakan sebuah keadaan dunia internasional yang berbeda. Negara tidak lagi saling menyerang satu sama lain sebagai sebuah bentuk untuk memperluas kekuasaan wilayah mereka. Kedaulatan negara telah diakui sebagai sebuah hak yang wajib dihormati oleh negara lain dan tidak boleh dilanggar atau diakuisisi tanpa aturan. Seiring perkembangan globalisasi, konsep Westphalia tidak lagi dipandang seperti dulu. Apa yang disebut batas negara, mulai kabur. Kabur bukan dalam artian negara kemudian tidak memiliki batas wilayah yang jelas, namun sekat antar negara tidak lagi seketat dulu. Perpindahan orang, arus informasi dan pengaruh dapat terjadi dengan cepat dan relatif mudah dari satu negara ke negara lain. Bahkan tidak jarang kejadian yang terjadi di sebuah negara di belahan bumi utara memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap negara-negara di belahan bumi selatan. Globalisasi ini juga memberikan kesempatan penyebaran dan proliferasi ancaman yang semakin cepat terhadap negara-negara di dunia.

Perkembangan dunia internasional yang dinamis mempengaruhi perkembangan ilmu politik dan hubungan internasional. Teori-teori yang dijadikan pisau analisis sebuah kasus ataupun fenomena hubungan antar negara menjadi dipertanyakan dan ditantang secara berkelanjutan. Banyak teori yang kemudian gugur, dianggap sudah tidak relevan lagi, lalu tergantikan dengan mazhab atau pemikiran-pemikiran baru yang dianggap lebih *compatible* dengan keadaan zaman sekarang. Dan demikian pula sebaliknya, pemikiran-pemikiran tokoh jaman dahulu yang dianggap sudah ketinggalan jaman, diinterpretasikan kembali, lalu menjadi sebuah paradigma yang ternyata masih relevan hingga saat ini.

Perkembangan paradigma yang dinamis ini tidak hanya terjadi pada para filsuf-filsuf barat semata. Namun juga pada karya-karya filsuf timur yang umurnya tidak kalah jauh lebih tua, tetapi ternyata pembahasannya bisa dikatakan lebih komprehensif daripada pemikir-pemikir barat. Seperti *Magnum Opus* dari Chanakya atau Kautilya berjudul Arthashastra. Arthashastra disusun oleh Chanakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthashastra karya Chanakya terdiri dari 32 bagian, 15 *adikarana* dengan 150 bab dan 6000 sloka. Dengan demikian Arthashastra dapat pula dikatakan sebagai sebuah kompendium tentang bagaimana mengelola suatu Negara secara lengkap dan detail. Atas karya yang begitu monumental ini, Chanakya dianggap sebagai tokoh politik Hindu yang legendaris, sehingga kejeniusannya sering disepadankan dengan para filsuf dan negarawan barat seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.

Menurut Max Weber (1978) dalam kuliah politiknya yang terkenal yaitu "*Politics of Vocation*", pemikiran Machiavelli justru bukanlah pemikiran yang brutal melainkan moderat, jika dibandingkan dengan pemikiran Sun Tzu dalam "*The Arts of War*" dan pemikiran Chanakyadalam "Arthashastra".¹ Kedua pemikiran ini juga berisikan anjuran dalam *statecraft* (seni memerintah) yang bahkan lebih kejam dengan menggunakan konsep penggunaan mata-mata, membunuh seorang musuh politik, penggunaan tentara bayaran, bahkan penyiksaan. Bahkan sebenarnya konsep penggunaan tentara bayaran sudah dikenal oleh Aristoteles (tentang tirani Pisistratus) dan Tacitus (tentang penguasa Tiberius) namun Machiavelli baik dalam kedua tulisannya tidak menganjurkan pemimpinnya untuk melakukan hal demikian. Machiavelli bahkan terkesan lebih lunak hanya

¹ Max Weber, "Politics as a Vocation," dalam *Weber: Selections in Translation*, ed W.G. Runciman, trans. Eric Matthews. (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), hlm 212–25.

dengan menganjurkan paham oportunisme politik yang berlandaskan pada sikap tamak, kejam, tidak dapat dipercaya, congkak dan keras kepala.²

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran dari “dunia timur” seperti Arthashastra ini masih menjadi pilihan kedua atau bahkan alternatif dalam analisa ilmu hubungan internasional. Menurut Amitav Acharya hal ini disebabkan karena sumber pemikiran barat dalam paradigma hubungan internasional didominasi oleh *Westphalian treaty* serta sumber-sumber Mediterania klasik seperti Romawi dan Yunani kuno. Para penstudi hubungan internasional yang belum melihat teori besar seperti itu dari masa lalu Sumeria, Mesir, Cina atau bahkan India kemudian menjadi terjebak pada gagasan bahwa Chanakya adalah *Indian Machiavelli* (Machiavelli nya India) ketimbang Machiavelli menjadi *ChanakyaEuroMediterran* (Chanakya nya EuroMediterania).³ Navnita Behera dari Universitas Delhi menjelaskan bahwa Hubungan Internasional dengan sifatnya yang *western* telah memperoleh hegemoni ala Gramsci atas dasar-dasar epistemologis dalam paradigma Hubungan internasional. Lebih lanjut, hal itu telah mempertahankan praktik-praktik disiplin *gatekeeping* yang secara langsung ataupun tidak telah mengendalikan dan membatasi akses ide-ide maupun konsep non barat untuk masuk dan menjadi teori utama dalam paradigma Hubungan Internasional.⁴ Diplomasi pertahanan sebagai salah satu ilmu baru yang banyak menerapkan paradigma-paradigma hubungan internasional tentu juga terimbas dengan hal ini. Paradigma dalam diplomasi pertahanan menjadi terkesan didominasi paradigma *western*.

² Roger Boesche, “Moderate Machiavelli? Contrasting The Prince With The Arthashastra of Kautilya”, *Critical Horizon*, Volume 3, Nomor 2 (Leiden, 2002), hlm. 253-276.

³ Amitav Acharya, “Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories Beyond the West”, *Millennium: Journal of International Studies*, Volume 39, Nomor 3, May 2011, hlm. 619–637.

⁴ Navnita Chadha Behera, “Re-imagining IR in India”, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 7, Nomor 3, 2007, hlm. 341–368.

Terlepas dari semua itu, penggalian dan interpretasi lebih mendalam membuat Arthashastra menemukan relevansinya ditengah perubahan jaman yang kian dinamis saat ini. Pemikiran-pemikiran Chanakya dalam Arthashastra jika diinterpretasikan secara harfiah mungkin akan terlihat ketinggalan jaman dan tidak relevan lagi. Namun jika interpretasinya disesuaikan dengan perkembangan saat ini keadaannya masih dapat dikatakan relevan. Misalkan mengenai teori mandala para pemikir barat hanya menekankan bahwa “*setiap negara tetangga adalah musuh (sumber ancaman), dan musuh dari musuhmu adalah teman mu*”.⁵ Jika dilihat dari pengertian ini semata, maka teori mandala Chanakya akan terlihat begitu realis dan sulit untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini menjadi kontradiktif dengan rezim regionalisme yang secara tidak langsung menuntut negara-negara yang bertetangga untuk bekerjasama satu sama lain demi tujuan bersama. Bahkan saat ini sebuah negara akan sulit bahkan sangat jarang menunjukkan kondisi yang bermusuhan secara langsung dan terang-terangan dengan negara tetangga mereka.

Sebagaimana kita lihat Indonesia dengan negara-negara tetangganya dalam lingkup ASEAN. Baik Indonesia maupun negara anggota ASEAN lain yang saling berbatasan, justru terikat dalam sebuah kesepakatan regional. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan, menangkal ancaman bersama dan upaya menuju tujuan-tujuan bersama dalam kerangka kerjasama ASEAN. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing negara sama-sama terlibat dalam kompetisi untuk mempertahankan dan memperjuangkan *national interest*-nya, tidak serta merta kemudian negara-negara yang bertetangga ini mendeklarasikan permusuhan satu sama lain. Sementara itu R.P Kangle (1986) menegaskan bahwa Chanakya sesungguhnya tidak memukul rata seluruh negara yang menjadi tetangga adalah musuh. Hal ini dibahas pada buku ketujuh, bab 18 sutra ke-29, bahwa

⁵ L.N. Rangarajan, *The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced*, (New Delhi, India: Penguin Books India Ltd, 1992) hlm viii.

Para pangeran negara tetangga, *samantas*, biasanya dianggap bermusuhan. Tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin memiliki perasaan ramah terhadap *vijigisu* (negara tengah), sementara yang lain mungkin bahkan tunduk padanya. Negara-negara tetangga terbagi ke dalam tiga kategori; *aribhavin* (dari disposisi bermusuhan), *mitrabhavin* (dari disposisi ramah) dan *bhrytyabhavin* (dari disposisi persaudaraan).⁶

Dilihat dari penyampaian tersebut maka sesungguhnya sebuah negara perlu memetakan cara yang akan dipakai untuk menghadapi negara-negara tetangganya. Bagaimana negara memetakan negara-negara sebagai *competitor* untuk digalang dalam kerjasama dan mana yang perlu diberikan perhatian khusus. Serta mana yang berpotensi memberi ancaman laten, dan mana yang berpotensi memberikan keuntungan bersama.

Dalam Arthashastra, Chanakya menawarkan diskusi yang luas dan benar-benar menarik mengenai perang dan diplomasi. Chanakya dalam Arthashastranya mengulas tentang dinamika kebijakan moneter dan fiskal dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, hubungan internasional, serta strategi perang. Menurut Kautilya, jika sebuah Negara ingin memiliki kekuasaan dalam hubungan dengan negara lain, ingin memenangkan perang, maka Negara tersebut harus memiliki ekonomi yang kuat. Chanakya juga memberikan penekanan pada sosok pemimpin yang energik dan dinamis yang dibutuhkan suatu negara untuk meningkatkan kharisma dan pengaruh negara itu. Karena jika pemimpinnya energik, rakyat dan ekonominya juga akan bergeliat, sementara jika pemimpinnya malas dan lamban, hal yang sama akan terjadi pada negara.

Meskipun telah diakui sebagai salah satu buku yang memberikan pemahaman terhadap diplomasi dan pertahanan Negara, namun sampai saat ini belum banyak penstudi di Indonesia baik itu para penstudi ilmu

⁶ R.P. Kangle, 1986. *The Kautilya Arthasastra, Part 3*, no. 14, hlm. 250

politik maupun penstudi ilmu hubungan internasional yang membahas dan mengenal baik konsep-konsep Arthashastra. Bahkan nyaris tidak ada buku teks Hubungan Internasional berbahasa Indonesia yang menyinggung Chanakya Arthashastra dalam fokus bahasannya. Kebanyakan buku teks hubungan internasional di Indonesia hanya berfokus pada kajian-kajian hubungan internasional dengan perspektif barat. Demikian halnya dengan konsep-konsep mengenai diplomasi dan pertahanan negara di Indonesia terasa masih begitu *western oriented*. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa dominasi teori barat dalam ilmu hubungan internasional maupun diplomasi pertahanan mengandung *bias* teoretis karena faktor nilai budaya yang berbeda dengan keadaan di Indonesia.

Padahal jika diamati lebih jauh pendekatan yang digunakan dalam Sistem Pertahanan Indonesia pun tidak selalu berkiblat kepada teori-teori barat. Sistem pertahanan yang diterapkan TNI di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan falsafah Jawa Kuna dalam manajemen serta praktik kepemimpinan pada masa awal pembentukan TNI di Indonesia memberikan warna tersendiri pada militer di Indonesia. Pada masa Presiden Soeharto misalnya, falsafah Jawa Kuno seperti "*Hasta Brata*" yang di padukan dengan *Sapta Marga* dan kemudian dikemas dalam konsep "*ngluruk tanpo wadyo bolo, menang tanpo ngasorake dan weweh tanpo kelangan*" serta "*waspodo purbowaseso*" menjadi dasar manajerial negara Indonesia saat itu.⁷

Demikian juga dengan penggunaan terminologi-terminologi berbahasa Sansekerta (yang diadopsi dengan penulisan Jawa Kuno) pada Doktrin Pertahanan Militer serta doktrin yang berlaku di masing-masing matra TNI. Doktrin Pertahanan Militer Indonesia adalah *Tri Dharma Eka Karma*, yang dijabarkan ke dalam tiga matra yaitu, Doktrin Pertahanan Militer Matra Darat "*Kartika Eka Paksi*", Doktrin Pertahanan Militer Matra

⁷ Suharono, "Strategi manajemen dan kepemimpinan Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia: Studi eksploratori formulatif dan kepustakaan" *Disertasi Doktorat*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, 2012).

Laut “*Eka Sasana Jaya*” dan Doktrin Pertahanan Militer Matra Udara “*Swa Bhuana Paksa*”. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh kemungkinan fusi ataupun asimilasi nilai-nilai dari pustaka-pustaka yang berasal dari India, dalam hal ini Arthashastra untuk dapat dijadikan paradigma dalam melakukan strategi Diplomasi pertahanan. Peneliti ingin melihat bagaimana nilai-nilai serta konsep yang terkandung pada teks Arthashastra karya Chanakya dapat menjadi dasar pada konsep diplomasi pertahanan, khususnya dalam konteks diplomasi pertahanan negara Republik Indonesia.

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1993, sebuah negara harus mempunyai empat unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan juga kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.⁸ Dengan demikian, dalam upaya merumuskan sistem pertahanan negara utamanya strategi diplomasi pertahanan negara, unsur-unsur ini diperlukan sebagai landasan berpikir. Sebuah sistem pertahanan negara yang baik harus mampu melindungi penduduk dan juga wilayah kedaulatannya dari ancaman, maka konsep mengenai pemetaan ancaman dibutuhkan. Berikutnya sebuah negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat berikut dengan sistem tata pemerintahannya, maka konsep mengenai tata pemerintahan dibutuhkan. Lebih lanjut terkait dengan keharusan keempat mengenai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka dibutuhkan konsep mengenai diplomasi. Dengan demikian peneliti memandang untuk bisa merumuskan konsep diplomasi pertahanan negara dari pandangan Chanakya dalam bukunya Arthashastra, diperlukan beberapa konsep dasar yang dapat memenuhi unsur-unsur di atas. Unsur pemerintahan berdaulat melalui konsep *statecraft*, unsur kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dengan konsep diplomasi dan

⁸ Pasal 1 Konvensi Montevideo dalam Lazarusli, Budi dan Syahmin A.K. 1986. *Suksesi Negara dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 7

unsur untuk mempertahankan penduduk serta wilayah negara adalah konsep pemetaan ancaman. Perumusan konsep diplomasi pertahanan dalam pandangan Chanakya ini dipandang penting. Karena dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi diplomasi pertahanan negara yang berasal dari sumber *non-western*. Sehingga dapat memperkaya khasanah konsep dalam sistem pertahanan negara.